BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Energi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan perekonomian suatu negara. Tanpa energi, suatu negara akan menemui hambatan dalam menjalankan kegiatan industri yang pada akhirnya dapat menghambat perekonomian suatu negara. Usaha manusia untuk menghindari semakin langkanya sumber daya energi telah banyak dilakukan. Sumber energi tersebut diperkirakan akan habis dengan cepat karena dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dunia yang meningkat pesat yang berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan dan konsumsi energi dunia sehingga makin lama energi tersebut akan habis. Dan energi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya sasaran pembangunan negara. Karena meningkatnya permintaan terhadap energi dapat berimbas pada perekonomian global yang tumbuh cepat. Pertumbuhan perekonomian berdampak pada peningkatan konsumsi energi yang digunakan untuk proses industri. Energi yang dimaksud adalah minyak mentah, gas, dan batu bara. Sumber energi tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*). Oleh karena itu tentu ketersediaannya terbatas dan harga yang terus melonjak naik. Energi tersebut juga diperlukan bagi setiap Negara, sehingga setiap Negara berusaha untuk memperoleh energi ini. Dari sinilah muncul berbagai upaya dari setiap Negara untuk menjamin ketersediaan dan keamanan pasokan energi yang sangat

penting tersebut. Untuk mendapatkan jaminan atas ketersediaan dan keamanan pasokan energi, suatu Negara dapat memilih bertindak bersahabat dengan bekerjasama melalui hubungan bilateral.

Dalam hal ini meningkatnya perekonomian Tiongkok menyebabkan permintaan energi Tiongkok dengan cepat menjadi isu politik internasional, Pertumbuhan ekonomi di Tiongkok pada tahun 1991-1997 mencapai 11,4 %, pertumbuhan ini disertai peningkatan konsumsi minyak sebesar 44,7% konsumsi minyak dari 1959 ribu barrel perhari menjadi 3543 ribu barrel perhari, sementara itu, prooduksi mnyak domestik hanya meningkat sebesar 20,47% dari 2423 ribu barrel perhari menjadi 3047 ribu barrel perhari. Pada 2001-2010, peningkatan produksi minyak hanya 15,93% dari 3047 ribu barrel perhari menjadi 3624,5 ribu barrel sedangkan konsumsi minyak meningkat sebesar 48,38% dari 3543 ribu barrel perhari menjadi 6864 ribu barrel perhari (Henry Wang, 1999: 5). Perbedaan antara produksi dan konsumsi minyak semakin besar di tahun 2001-2010, karena lonjakan impor minyak Tiongkok secara tiba-tiba di tahun 2004 dan perusahaan minyak Tiongkok berusaha untuk memperoleh aset-aset minyak asing dari negara lain, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan terancam jika pasokan energi mengalami kekurangan. Pemerintah Tiongkok pun menyadari bahwasanya energi merupakan isu-isu strategis yang penting kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, stabilitas sosial, dan keamanan nasional, peningkatan konsumsi energi Tiongkok yang begitu pesat ini didorong oleh cepatnya pertumbuhan ekonomi, pesatnya pertumbuhan industrialisasi, tingginya angka urbanisasi, dan pertumbuhan ekspor (Yi-Chong, 2007: 268).

Sejak meningkatnya permintaan energi Tiongkok yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat, terutama industri ekspor, perekonomian Tiongkok telah menjadi bagian yang penting dari perekonomian global. Tiongkok berpotensi mengalami krisis energi karena produksi energi domestik tidak mampu mencukupi kebutuhan industri dan kebutuhan sehari-hari masyarakatnya yang kemudian dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di kemudian hari (Safril, 2011: 169). Peningkatan jumlah konsumsi energi di Tiongkok tidak diikuti dengan signifikansi peningkatan produksi sehingga hal ini memaksa Tiongkok berpindah posisi yang awalnya pada tahun 1980an menjadi eksportir minyak terbesar di Asia Timur, menjadi importir minyak terbesar kedua di dunia pada tahun 2004 (Safril, 2011: 171-172). Dalam hal ini penambahan volume produksi minyak di Tiongkok dapat dilakukan dengan mendatangkan suplai dari luar Tiongkok.

Berikut adalah negara-negara yang bekerja sama dengan Tiongkok dalam sektor Energi minyak yaitu: Kazakhstan, Kanada, Ekuador, Suriah, Angola, Iran, Indonesia, Kolumbia, Chad, Yaman, Australia, Nigeria, Norwegia, Irak, Trinidad-Tobago, Singapura, Amerika Sertikat, Venezuela, Mesir, Brazil, Kuba, Argentina, Uganda, Saudi Arabia, Kamerun, Brunei, Afganistan, Madagaskar, Belgia, Nikaragua, Britania, Swiss, Kamboja, dan Korea Selatan. Dalam hal ini Kazakhstan sangat potensial untuk menjadi satu dari lima teratas sebagai eksportir minyak, produksinya pada tahun 2002 mencapai 900.000 barel per hari, akan meningkat menjadi 5 juta barel per hari pada tahun 2015 sehingga melebihi produksi Iran atau Kuwait. Turkmenistan merupakan salah satu negara yang

mempunyai sumber gas alam terbesar di dunia, yang mencapai 101 trilyun kaki kubik dan produksi minyaknya 160.000 per hari. Sementara itu di Tajikistan dan Kyrgistan terdapat sumber alam yang dapat dijadikan pembangkit listrik tenaga air yang cukup potensial untuk dapat memenuhi kebutuhan energi listrik di Asia Tengah, Afghanistan dan Asia Selatan (http://online.incg.edu/courses/china/pdf/Powe_%20Politics_Central_Asia.pdf diakses tanggal 04-03-2016).

Dalam hal ini, Bagi Tiongkok Kazakhstan merupakan negara yang menjadi target utama dalam pemenuhan energi minyaknya, hal ini disebabkan oleh faktor geografis merupakan salah satu alasannya karena Tiongkok sendiri bersebelahan langsung dengan Kazakhstan, meskipun terdapat beberapa negara produsen minyak di sekitar Tiongkok, seperti Rusia, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kyrgyztan, cadangan minyak di negara tersebut tidak sebanyak Kazakhstan. Cadangan minyak Kazakhstan menempati peringkat ke-11 seluruh dunia dengan 30 triliun barel cadangan minyak dan merupakan terbesar kedua di Asia Tengah setelah Russia. Terdapat dua penjelasan utama keuntungan investasi Tiongkok di Kazakhstan. Pertama, investasi ini memungkinkan Tiongkok untuk mengalihkan suplai energi dari jalur laut yaitu wilayah Kaspia ke jalur darat, sehingga tidak ada campur tangan dari Amerika Serikat. Kedua, deposit minyak Kazakhstan melimpah dengan konsumsi energi yang masih rendah, tumbuh sebagai negara produsen dan pengekspor di pasar energi global. Di samping itu, Kazakhstan merupakan negara penting dalam sektor energi di Kaspia. Harapannya, suplai energi dari Kazakhstan diperkirakan membantu suplai energi Tiongkok di masa mendatang. Kazakhstan menanggapi dengan positif tentang kerjasama dengan

Tiongkok, walaupun Negara di Asia Tengah lainnya tidak seoptimis itu karena mereka beranggapan bahwa Tiongkok akan menggantikan dominasi Rusia di kawasan ini (Robert, George, 2008: 295-319)

Hal ini menjadikan Kazakhstan sebagai kunci utama sektor energi di Asia tengah, Tingkat pertumbuhan ekonominya yang mencapai 9.3 % di tahun 2004 dan 7 % di tahun 2010 membuat Kazakhstan tumbuh sebagai negara paling modern di wilayah Asia Tengah, pertumbuhan ekonomi ini utamanya disumbang dari industri pertambangan mineral, minyak dan gas. Dari semua sektor energi dan pertambangan mineral, sektor minyak yang menjadi perhatian dari investasi asing. Dari US$ 13 milyar investasi sejak tahun 1992-2001, hampir 50% berasal dari investasi minyak dan gas. Investasi tersebut sebagian besar terdapat di enam perusahaan kilang minyak Kazakhstan yaitu Tengiz, Uzen, Mangistau, Kenkiyak, Zhanazol, dan Kumkol (http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=KZ diakses tanggal 04-03-2016).

Tiongkok mengutamakan hubungan bilateral dan membangun kerjasama yang lebih berjangka panjang. Salah satu usaha yang dilakukan adalah seperti membangun pipa minyak bawah tanah yang mempu menyalurkan minyak dari negara tetangga ke Tiongkok, yang diharapkan dapat membantu pasokan energi di wilayah Tiongkok utamanya negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan dan Uzbekistan (Oodgard, Delman, 2014 : 108).

Kebijakan dalam politik energi Tiongkok ditujukan untuk mengatasi persoalan yang berasal dari lingkup domestik selain juga mengatasi permasalahan global terkait keamanan energi. Pertama, berkurangnya sumber daya energi utama

seperti minyak. Kedua, ketergantungan pada sumber energi asing. Ketiga, konsep keamanan energi dalam konteks geopolitik yang melibatkan rezim pemerintahan yang berkuasa, ancaman terhadap terorisme yang mempengaruhi stabilitas suplai energi suata negara. Keempat, energi yang dibutuhkan negara lebih miskin dan permintaan energi dari negara yang sedang berkembang seperti India dan Tiongkok. Kelima, tercapainya efisiensi ekonomi terhadap kebutuhan energi yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi. Keenam, isu lingkungan dan energi, yang mana penggunaan energi saat ini (bersumber pada sumber daya minyak) berakibat pada kerusakan lingkungan. Terakhir, konsep keamanan energi yang berhubungan dengan ketersediaan alternatif energi sebagai sumber energi utama menggantikan minyak (http://www.globalissues.org/article/595/energy-security diakses tanggal 04-03-2016).

Dengan adanya kebijakan energi Tiongkok yang berorientasi pada perdagangan dan investasi maka Tiongkok mengembangkan strategi perdagangan dan investasi secara agresif. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Lembaga Kementrian Badan Energi Nasional Tiongkok yaitu NEC *(National Energy Commision)*, pada masa kepemimpinan Jiang Zemin (1993-2003) di mana politik luar negeri Tiongkok semakin meningkatkan intensitas pembangunan perekonomian Tiongkok dengan melakukan interaksi ekonomi secara internasional, yang kemudian di lanjutkan Pada masa kepemimpinan Hu Jntao (2003-2013). Kebijakan tersebut menempatkan keamanan energi Tiongkok dalam skenario jangka panjang dalam pasar energi global, yakni berorientasi mendapatkan lebih banyak impor minyak dari luar. Pembangunan cadangan minyak strategis di luar

dan mengamankan sumber-sumber impor minyak, sekaligus berinvestasi dalam pengembangan minyak di dalam negara produsen minyak. Dalam memenuhi kebutuhan energi minyak dari Kazakhstan, Tiongkok mengerahkan perusahaan minyak nasional Tiongkok untuk terjun langsung ke dalam proses perolehan energi. Perusahaan tersebut merupakan CNPC (*China National Petroleum Corporation*) yang mana investasi asingnya telah mencakup negara-negara di Timur Tengah, Argentina, Bangladesh, Kanada, Kolumbia, Ekuador, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Nigeria, Pakistan, Papua, Peru, Russia, Thailand, Turkmenistan, Venezuela, dan Amerika Serikat. CNPC bahkan semakin aktif menandatangani kontrak eksplorasi dan produksi dengan sedikitnya dua puluh negara. Sejak akhir tahun 1997, CNPC bahkan telah menandatangai konsesi bernilai lebih dari $ 8 juta untuk konsesi minyak di Sudan, Venezuela, Irak, dan Kazakhstan. Oleh karena itu, perdagangan dan investasi kini menjadi elemen utama dalam setiap kerjasama energi Tiongkok. Bahkan CNPC memegang peran signifikan di berbagai ekplorasi dan produksi minyak di Kazakhstan dengan saham Aktobemunaigas (eksplorasi minyak terbesar keempat di Kazakhstan) yang dimiliki mencapai lebih dari 85.42%, 60% saham di PetroKazakhstan (http:// www.cnpc.com.cn/eng/cnpcworldwide/euroasia/Kazakhstan/ diakses tanggal 04-03-2016).

Penetrasi Tiongkok di Kazakhstan diawali dengan akuisisi 60.7% saham Aktobemunaigaz oleh CNPC pada 1997. Akuisisi CNPC di Aktobemunaigaz, juga diikuti oleh kesepakatan dengan perusahaan minyak lainnya seperti Uzenmunaigaz pada 1997, Buzachi North Field pada 2003, Petrokazakhstan di

tahun 2005, dan Mangistaumunaigaz pada 2010 sehingga CNPC tumbuh semakin signifikan utamanya di sektor minyak Kazakhstan (http://www.cnpc.com.cn/eng/company/presentation/history/MajorEvents/2007.htm diakses tanggal 04-03-2016)

Suplai minyak Tiongkok selama ini ditopang dari berbagai negara pengekspor minyak di dunia. Tiongkok juga mengumumkan bantuan senilai $ 30 miliar di Kazakhstan, termasuk membenamkan saham BUMN CNPC sebesar $ 5 miliar di proyek minyak lepas pantai Kashagan, meskipun masih terlalu cepat untuk mengucapkan kesepakatan tersebut sebagai keberhasilan, kenyataan itu mewakili komitmen Tiongkok untuk berinvestasi lebih banyak di wilayah tersebut. Masing-masing sumber suplai memiliki gangguan yang diprediksi mengancam keamanan energi Tiongkok. Telah diketahui sebesar 44% minyak Tiongkok berasal dari negara di Timur Tengah (Saudi Arabia, Iran, Irak, Kuwait, dan Oman), 27% dari negara lain (Brazil, Libya, Angola, dan Sudan) dan 19% lainnya harus melewati jalur laut yang memakan waktu lama. Sebagian besar minyak Tiongkok, yakni lebih dari 62% (Saudi Arabia, Angola, Oman, Sudan, Kuwait, Brazil, Lybia, dan 19 % lainnya) harus disalurkan melalui kapal-kapal tangki minyak. Transportasi melalui kapal ini lebih beresiko dan memakan biaya lebih banyak. Padahal terdapat suplai minyak dari negara terdekat seperti Kazakhstan, Russia, dan Iran yang dapat disalurkan melalui jalur darat melalui pipa-pipa minyak. Dibandingkan transportasi darat dengan kereta api maupun jalur laut dengan kapal-kapal tangki, transportasi melalui pipa dianggap beresiko paling rendah. Pengalihan suplai minyak dari jalur laut ke jalur darat melalui

Kazakhstan dianggap sebagai alternatif yang menguntungkan (Yi-Chong, 2007: 66). Oleh karena itu, Tiongkok semakin berupaya untuk berekspansi dengan cara investasi maupun akuisisi di kilang minyak Kazakhstan melalui CNPC dengan membiayai dan membangun jalur pipa transnasional. Pipa transnasional dapat menjamin suplai dari wilayah kaya minyak di Kazakhstan ke kilang minyak di Tiongkok yang diawasi langsung oleh CNPC. Dengan demikian, peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan melalui CNPC akan sangat menentukan keamanan suplai energi utamanya suplai minyak dari Kazakhstan (Clarke, Ryan. 2010)

Dalam hal ini, Tiongkok sangat tergantung pada Kazakhstan dalam sektor energi minyak. Kerjasama dengan Kazakhstan berlanjut dalam pembangunan jalur pipa minyak sepanjang 3.000 kilometer dari Kazakhstan Tengah menuju Xinjiang dan sepanjang 1.240 kilometer dari Atasu di barat laut Kazakhstan ke Xinjiang. Pembangunan jalur pipa minyak ini semakin mempererat kerjasama energi kedua negara. Hanya saja, proyek konstruksi itu sedikit terhambat oleh gangguan rakyat Xinjiang yang menuntut kemerdekaan. Karena hambatan itu, dalam waktu tujuh tahun sejak disepakati, jalur pipa yang terbangun baru sepanjang 400 kilometer (Zhao, 2008 : 218).

Investasi CNPC di Kazakhstan pada tahun 1997-2010 merupakan strategi kedua Tiongkok untuk memperdalam pengaruhnya dalam mendapatkan akses ke sumber-sumber minyak Kazakhstan. Investasi Tiongkok dalam CNPC di Kazakhstan meningkat drastis sejak akuisisi Aktobemunaigaz (AMG) dan Uzenmunaigaz (UMG). Faktor pendorongnya yakni bantuan Tiongkok yang

diberikan kepada pemerintah Kazakhstan. Bantuan berupa insentif keuangan dan pinjaman berperan untuk membuka akses investasi masuk. Berdasarkan catatan Bank Nasional Kazakhstan, sejak tahun 2000 FDI dari Tiongkok tidak lebih dari US$ 500 juta. Tetapi di tahun 2008, nilai meningkat hingga US$700 juta. Bahkan terhitung sejak 2001-2008, jumlah nilai FDI Tiongkok di Kazakhstan bahkan melampaui US$ 2.5 milyar (http://www.Tiongkokdaily.com.cn/business/2009-04/28/content_7722725.htm diakses pada tanggal 06-03-2016).

Tiongkok menandatangani *Treaty of Enhancing Military Mutual Trust in the Border Areas* yang juga dikenal dengan *"Shanghai Five"* dengan Rusia, Kazakhstan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan di Shanghai pada April 2006. Dalam perkembangannya, kesepakatan ini juga melibatkan Uzbekistan dan berganti nama menjadi *Shanghai Cooperation Organization* (SCO). Pembicaraan dalam SCO lantas tidak hanya terfokus pada isu keamanan, tetapi semakin meluas ke energi. Kazakhstan merupakan mitra utama Tiongkok di sini. Pada Juni 2005, Jintao mengunjungi negara ini dan sepakat untuk menjalin kemitraan strategis melalui investasi CNPC di sejumlah ladang minyak Kazakhstan. CNPC kini memiliki 85,4 persen saham Aktobemunaigas Corporation (Zhao, 2008 : 216-217).

Kebijakan energi Tiongkok Pada awal tahun 1997, pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan *"going out".* Kebijakan ini dianggap sebagai pintu masuk berbagai investasi sebagai insentif untuk perusahaan Tiongkok beroperasi di pasar global. Kebijakan ini bertujuan untuk mencari ruang baru bagi perusahaan-perusahaan yang terkualifikasi layak untuk meluaskan bisnisnya. Kebijakan ini terfokus pada pembelian sebagian aset maupun ekuitas perusahaan

kilang minyak yang sedang berkembang. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan biaya eksplorasi di kilang minyak baru. *"Go out policy"* menawarkan keuntungan-keuntungan investasi lebih besar. Pertama, dengan membeli ekuitas perusahaan kilang minyak, memungkinkan Tiongkok untuk mengurangi resiko fluktuasi harga minyak. Investor lebih mudah mengkalkulasi jumlah minyak yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Investasi di luar negeri memungkinkan investor untuk memperoleh harga yang lebih rendah daripada harga yang ditawarkan di perdagangan minyak global. Investasi ke luar ini terus berkembang di banyak negara di berbagai kawasan antara lain Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tengah.

Di Asia Tengah, cadangan minyak terbesar terdapat di wilayah Kaspia. Di wilayah tersebut, Tiongkok menjalin kemitraan strategis dalam bidang energi dengan Kazakhstan. Hal ini disebabkan Kazakhstan merupakan pemain penting dalam sektor energi di wilayah Kaspia. Kazakhstan juga menjadi kunci utama akses cadangan minyak di Kaspia. Kemitraan strategis energi Tiongkok di Kazakhstan telah dirintis sejak tahun 1997 melalui Perusahaan Nasional Negara, CNPC (http://www.gov.cn/jrzg/2007-08/10/content_711929.htm diakses pada tanggal 04-03-2016).

Pada tahun 1998-2005 Tiongkok berhasil menjalin kesepakatan-kesepakatan minyak jangka panjang dengan Kazakhstan. Strategi yang seringkali merugikan dan kurang berhasil memperoleh ekuitas melalui investasi langsung, kini dilengkapi dengan kebijakan model baru yaitu *"Loan for oil"* kepada rezim pemerintahan yang sedang membutuhkan bantuan keuangan. Krisis keuangan dan

harga minyak yang jatuh memberi sinyal-sinyal urgensi perekonomian Kazakhstan. Celah ini yang dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk menjalin dan memperdalam kemitraan energi dengan Kazakhstan utamanya di sektor perminyakan. Dengan ini, pemerintah Tiongkok sekaligus membuka peluang baru bagi perusahaan minyak nasional dan perusahaan minyak domestik (http://www.china.org.cn/opinion/2009-09/11/content_18509242.htm diakses tanggal 04-03-2016)

Salah satu kebijakan energi yaitu *Transnational Oil Pipeline* (2004-2011) beranggapan bahwa keamanan energi Tiongkok dapat tercapai apabila Tiongkok mengalihkan jalur rute transfer minyak dari jalur laut (atau seringkali disebut *Sea Lines of Communication* atau SLOCs) ke jalur darat. Strategi kebijakan ini ialah membangun pipa transnasional yang menyalurkan suplai dari negara eksportir minyak ke Tiongkok. Pembangunan pipa ini merupakan implementasi keuntungan strategis daratan Tiongkok yang berbatasan langsung dengan negara eksportir minyak. Pembangunan pipa transnasional juga memberikan keuntungan. Pembangunan pipa ini juga juga menuai perdebatan karena rentan terhadap serangan udara. Selain itu biaya untuk membangun pipa minyak transnasional sangat besar. Oleh karena itu, muncul banyak kajian yang mengungkapkan bahwa kebijakan pembangunan pipa transnasional tidak ekonomis (http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=CH#pet diakses tanggal 05-03-2016)

Ketiga kebijakan energi di atas menjadi inti kebijakan luar negeri Tiongkok untuk menjamin suplai energi mendatang. Kebijakan energi Tiongkok

melalui CNPC ini berjalan semakin intensif seiring dengan peningkatan kualitas kemitraan strategis Tiongkok dengan Kazakhstan. Kemitraan strategis ini menciptakan *win-win situation* bagi kedua pihak. Kemitraan strategis Tiongkok membantu Kazakhstan dalam beberapa hal penting terutama dalam politik dan perekonomian. Secara politis, kemitraan strategis Tiongkok membantu Kazakshtan lebih independen dari kontrol energi utamanya minyak Russia. Dalam hal perekonomian, kemitraan strategis dengan Tiongkok memungkinkan sektor industri lainnya berkembang, seperti perdagangan barang dan jasa dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pipa minyak. Kemitraan strategis ini mendapat sambutan positif dari dua negara.

Untuk memperoleh pijakan ilmiah dalam penelitian ini, peneliti merujuk beberapa karya ilmiah yang sudah dibuat sebelumnya dan berkaitan dengan tema yang diangkat dalam skripsi peneliti yakni masalah *Kebijakan Tiongkok dalam keamanan pasokan energi*. Salah satu karya ilmiah tersebut adalah skripsi yang berjudul *"Kebijakan Luar Negeri Cina Dalam Mengamankan Pasokan Energinya Terhadap Penolakan Oleh Warga Arakan Dalam Kerangka Kerjasama Pembangunan Proyek Pipa Minyak Dan Gas Trans-Cina-Myanmar"* yang dibuat pada tahun 2013 oleh Meylysania Olyvia Devy, Universitas Airlangga.

Dalam skripsi tersebut peneliti yang bersangkutan mengangkat masalah yang sama yaitu *Kebijakan Tiongkok dalam keamanan pasokan energi*. Peneliti yang bersangkutan dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok dalam melakukan pengamanan sumber daya energinya di Myanmar di tengah penolakan pembangunan pipa minyak dan

gas Tiongkok oleh warga Arakan. Berangkat dari kekurangan bahan baku energi yang memiliki pengaruh besar bagi laju perekonomian negaranya, Tiongkok berusaha melakukan pencarian energi di berbagai wilayah negara lain, salah satunya Myanmar yang memegang peranan penting dalam rangkaian jalur pipa miyak dan gas Tiongkok, yakni *string of pearl*. Rangkaian ini membujur secara melingkar dari wilayah utara Tiongkok hingga ke selatan yang akhirnya berbelok melalui Myanmar. Pembangunan konstrukti pipa minyak dan gas Tiongkok ini memotong secara vertikal wilayah geografis Myanmar yang menghubungkan pelabuhan Kyaukphyu di barat daya Myanmar hingga naik ke atas ke wilayah Tiongkok sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan Myanmar.

Karya tulis lain yang membahas permasalahan yang sama adalah, sebuah jurnal yang berjudul "*Kerjasama Cina-Kazakhstan Dalam Memenuhi Kebutuhan Energi Minyak Cina"*, yang dibuat tahun 2014 oleh Nurul Hafiah, Universitas Mulawarman.

Dalam karya tulis tersebut penulis yang bersangkutan menjelaskan Kerjasama Tiongkok Kazakhstan berupa bentuk kebijakan seperti investasi yang diimplementasikan melalui perusahaan miliki negara yaitu CNPC, Terealisasinya pipa minyak transnasional dan bekerjasama dibidang militer. Tiongkok mendapatkan minyak dari Kazakhstan hanya 4% dari kebutuhan minyak domestiknya. Hasil dari ketiga kerjasama minyak tersebut telah mendapatkan hasil yang baik, berupa *win win situation* bagi kedua pihak, baik bagi pemerintah Kazakhstan dan pemerintah Tiongkok. Dimana kedua-duanya mendapatkan keuntungan secara timbal balik. Tiongkok mendapatkan cadangan energi untuk

pertumbuhan industrinya sedangkan Kazakhstan sendiri dapat mengembangkan perekonomiannya, perbaikan berbagai macam infrastruktur, dan kecanggihan teknologi, serta edukasi.

Berbeda dengan penelitian ini yang akan dilakukan peneliti yaitu menyoroti betapa pentingnya minyak yang cukup dalam agenda keamanan energi dan kebijakan negara. Terkait tulisan ini adalah kasus CNPC di Kazakhstan yang melakukan kebijakan pemerintah Tiongkok terkait keamanan suplai energi di Kazakhstan. Kebijakan Tiongkok untuk mengawali investasi di Kazakhstan melalui CNPC telah dimulai sejak tahun 1997 hingga saat ini. Intervensi dan peran pemerintah Tiongkok di CNPC untuk menentukan masih sangat kuat dalam setiap kesepakatan kerjasama energi, akuisisi, kemenangan tender, dan ijin investasi di perusahaan-perushaan minyak Kazakhstan.

Berdasarkan fakta dan paparan diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan kedalam sebuah laporan penelitian dengan judul:

> "**Kebijakan Keamanan Energi Tiongkok (Studi Kasus: Ekspansi *China National Petroleum Corporation* (CNPC) Di Kazakhstan Tahun 1997-2011).**

Penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah pokok yang telah dipelajari di prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia yaitu:

1. Analisis Politik Luar Negeri

Dalam mata kuliah ini peneliti dapat mempelajari tentang interaksi para aktor politik atau pihak-pihak pemerintahan dengan lintas batas negara sehingga tergambar dengan jelas bagaimana sebuah negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain. Dan memberikan pemahaman mengenai penentuan Kebijakan Luar Negeri suatu negara, yang berelasi dengan konsep hubungan bilateral antara Tiongkok dan Kazakhstan dalam Suplai energi minyak

2. Hubungan Internasional di Asia Timur

   Dalam mata kuliah ini peneliti dapat mempelajari mengenai karakteristik Tiongkok.

3. Studi Keamanan Internasional

   Dalam mata kuliah ini peneliti dapat mempelajari mengenai suatu Negara dalam mempertahankan keamanan Internasionalnya dalam bidang kerjasama Antar Negara. Seperti yang dilakukan Tiongkok dalam mempertahankan keamanan negaranya ketika kerjasama suplai energi minyak dengan Kazakhstan yang dimana ancaman sering sekali muncul dari luar seperti ancaman militer, politik, sosial, dan ekonomi.

4. Diplomasi dan Negosiasi

   Mata kuliah ini sebagai Acuan dasar bagi peneliti dalam memahami politik luar negeri suatu negara dalam berdiplomasi dan bernegosiasi ketika bekerjasama antar Negara, seperti ketika Tiongkok berdiplomasi dan bernegosiasi dengan Kazakhstan untuk Kerjasama suplai energi.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana Kebijakan Keamanan Energi Tiongkok Melalui Ekspansi CNPC Di Kazakhstan Terkait Dengan Suplai Energi Minyak Di Tiongkok Pada Tahun 1997-2011?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apakah arti penting Kazakhstan bagi Tiongkok dalam suplai energi minyak di Tiongkok?
2. Bagaimana Ekspansi CNPC di Kazakhstan berdasarkan 3 kebijakan keamanan energi yang dikeluarkan oleh Tiongkok?
3. Bagaimana dampak Ekspansi CNPC di Kazakhstan bagi kebutuhan energi minyak Tiongkok?

1.2.3 Pembatasan masalah

Dalam memfokuskan lingkup kajian penelitian, dan lebih memudahkan penelitian ini, peneliti membatasi masalah berdasarkan ketika CNPC mulai memasuki sektor minyak Kazakhstan dengan membeli 60.7% saham Aktobemunaigaz pada 1997. Jangkauan penelitian ini berakhir pada tahun 2011, ditandai dengan pencapaian terakhir CNPC dalam peresmian jalur

pipa minyak sepanjang 3000 km yang menghubungkan Atasu (Kazakhstan) dan Alashankou (Tiongkok).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti Kebijakan Keamanan Energi Tiongkok Melalui Ekspansi CNPC Di Kazakhstan Terkait Dengan Suplai Energi Minyak di Tiongkok. Pada Tahun 1997-2011.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa arti penting Kazakhstan bagi Tiongkok terkait suplai keamanan energi minyak di Tiongkok.
b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa bagaimana ekspansi CNPC di Kazakhstan Berdasarkan 3 kebijakan keamanan energi yaitu, kebijakan *Going Out*, kebijakan *Loan For Oil*, dan kebijakan *Transnational Oil Pipeline*.
c. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa dampak apa saja dari kebijakan keamanan energi yang dikeluarkan oleh Tiongkok terhadap kebutuhan energi minyak Tiongkok.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada maksud dan tujuan serta latar belakang yang terdapat pada penelitian ini, maka peneliti mengkatagorikan kegunaan penelitian ini menjadi dua bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini, Agar dapat mengembangkan pengetahuan mengenai kebijakan keamanan energi Tiongkok melalui ekspansi CNPC Di Kazakhstan Terkait Dengan Suplai Energi Minyak di Tiongkok Pada Tahun 1997-2011. Sehingga dapat memberikan informasi secara tepat, akurat dan relevan mengenai penelitian tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan peraktis dari hasil penelitian ini, di harapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan juga informasi bagi :

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan,dapat memberikan sutu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam perkembangan ilmu pengetahuan
2. Bagi peneliti agar dapat menambah wawasan dengan ilmu yang telah diperoleh secara teori di penelitian ini
3. Bagi peneliti lain agar dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama
4. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika